Drs. H. Mukhtarudin

Anggota DPR/MPR RI A-334 Fraksi Partai Golkar
Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah

GOLONGAN KARYA

DAFTAR ISI

Sejarah Golkar ..... (1)
Visi & Misi Partai Golkar ..... (3)
Profil Drs. H. Mukhtarudin ..... (4)
Komisi VII DPR RI ..... (7)
Banggar DPR RI ..... (9)

GOLONGAN KARYA

SEJARAH PARTAI GOLKAR

Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat (seperti Letkol Suhardiman dari SOKSI) menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I, Desember 1965.

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga mencapai 291 organisasi.

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu: 1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO) 2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) 3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) 4. Organisasi Profesi 5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM) 6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI) 7. Gerakan Pembangunan.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), merupakan partai politik di Indonesia. Partai Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964 oleh Soeharto dan Suhardiman.

Berikut Ketua dari Partai Golkar dari tahun ke tahun hingga sekarang : Djuhartono (1964-1969). Suprapto Sukowati (1969-1973). Amir Moertono (1973-1983). Sudharmono (1983-1988). Wahono (1988-1993). Harmoko (1993-1998). Akbar Tandjung (1998-2004). Jusuf Kalla (2004-2009). Aburizal Bakrie (2009-2014 & Januari-Mei 2016). Aburizal Bakrie & Agung Laksono (dualisme kepemimpinan) (2014-2016). Setya Novanto (2016-2017). Airlangga Hartarto (2017-2019) (2019-sekarang).

Dengan doktrin karya kekaryaan Partai GOLKAR berorientasi pada program (*program oriented*) dan atau pemecahan masalah (*problem solving*), bukan berorientasi pada aliran atau ideologi (*ideology oriented*).

Visi Partai GOLKAR

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

MISI

Misi Partai GOLKAR

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.
3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

Drs. H. Mukhtarudin adalah seorang tokoh asli dari Kalimantan Tengah, yang lahir di Pangkalan Bun pada 6 September 1964, merupakan anak kelima dari pasangan H. Djuhari Djarni dan Hj. Marhumah.

Mukhtarudin menempuh pendidikan di kota Pangkalan Bun, yakni di SDN – 2 Pangkalan Bun (lulus1977), SMP – 1 Pangkalan Bun (lulus 1981), SMA – 1 Pangkalan Bun (lulus 1984), dan terakhir menempuh pendidikan S1 FISIPOL jurusan administrasi Negara di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin – Kalimantan Selatan.

Mukhtarudin memiliki segudang pengalaman dalam baik di eksekutif maupun legislatif dan pengabdian pada masyarakat, Pernah sebagai staf pengajar (dosen) pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara yang sekarang sudah menjadi Universitas Antakusuma Pangkalan Bun dan merupakan salah seorang inisiator dan pendiri Universitas Antakusuma dan menjadi anggota Yayasan Kotawaringin, yang merupakan yayasan hasil merger Yayasan Pembinaan Pendidikan Beringin (STIE) dan Yayasan Pendidikan Kotawaringin (STIH).

Di Lembaga Eksekutif pernah berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara sejak tahun 1990 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bidang Promosi pada Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Setelah berkarier sebagai Aparatur Sipil Negara selama 12 tahun maka pada tahun 2002 mengundurkan diri dari Aparatur Sipil Negara dan terjun ke politik dan jadi pengusaha serta menjadi Anggota DPR RI periode 2004 – 2009 Hasil pemilu Legislatif 2004 dari Partai Golkar.

Drs. H. Mukhtarudin mengawali kariernya di Partai Politik berperan aktif hingga sekarang di Partai GOLKAR yang sejak tahun 1998-199 sebagai Wakil Ketua DPD II partai Golkar Kotawaringin Barat, kemudian tahun 2003-2008 sebagai wakil ketua DPD II partai Golkar Kotawaringin Barat, tahun 2008 sebagai Wakil Ketua Sub Divisi Evakuasi dan Perencanaan BAPPILU DPP Partai Golkar, sebagai Wakil Koordinator Provinsi Kalimantan Tengah Bappilu DPP Partai Golkar tahun 2008, Sebagai Wakil Sekretaris LPK DPP Partai Golkar, Tahun 2005-2009 ditunjuk sebagai Wakil Ketua POKJA Kehutanan dan LH DPP Partai Golkar, kemudian tahun 2009-2014 sebagai Anggota Dep. PP Wilayah Kalimantan DPP Partai Golkar, dan hingga tahun 2018 dipercaya sebagai Wakil Ketua KORBID Pemenangan Pemilu Jawa dan Kalimantan.

Saat ini Drs. H. Mukhtarudin menjadi Anggota DPR RI Komisi 7 (VII) Membidangi Energi, Riset dan Teknologi, dan Perindustrian. Anggota Badan Anggaran DPR RI - AKD (Alat Kelengkapan Dewan). Fraksi Partai Golkar-Wakil Ketua Bidang Perindustrian dan Pembangunan. DPP Partai Golkar-Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial. DPP Partai Golkar-Bappilu Koordinator Wilayah Kalimantan Tengah.

Ruang Lingkup dan Tugas Pokok Komisi VII DPR RI

Komisi VII DPR RI merupakan satu dari 11 (sebelas) Komisi yang ada di DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

1. Energi
2. Riset dan Teknologi
3. Perindustrian

Mitra Kerja Komisi VII DPR RI

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 44/DPR RI/I/2019-2020 Tentang Penetapan Mitra Kerja Komisi-Komisi, Badan Anggaran, Dan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, tanggal 31 Oktober 2020, mitra kerja Komisi VII adalah sebagai berikut:

1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Kementerian Perindustrian
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
6. Badan Informasi Geospasial (BIG)
7. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
11. Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman
12. Dewan Energi Nasional (DEN)
13. Pusat Peragaan IPTEK

1. Badan Anggaran dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.
2. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Anggaran menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.
3. Susunan dan keanggotaan Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas anggota dari tiap-tiap komisi yang dipilih oleh komisi dengan memperhatikan perimbangan jumlah anggota dan usulan fraksi
4. Pimpinan Badan Anggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
5. Pimpinan Badan Anggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Anggaran berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tugas Pokok Badan Anggaran

(1) Badan Anggaran bertugas:

a. membahas bersama Pemerintah yang diwakili oleh menteri untuk menentukan pokok-pokok kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan

acuan bagi setiap kementerian/lembaga dalam menyusun usulan anggaran;

b. menetapkan pendapatan negara bersama Pemerintah dengan mengacu pada usulan komisi terkait;

c. membahas rancangan undang-undang tentang APBN bersama Presiden yang dapat diwakili oleh menteri dengan mengacu pada keputusan rapat kerja komisi dan Pemerintah mengenai alokasi anggaran untuk fungsi, program, dan kegiatan kementerian/lembaga;

d. melakukan sinkronisasi terhadap hasil pembahasan di komisi mengenai rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga;

e. membahas laporan realisasi dan prognosis yang berkaitan dengan APBN; dan

f. membahas pokok-pokok penjelasan atas rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

(2) Badan Anggaran hanya membahas alokasi anggaran yang sudah diputuskan oleh komisi.

(3) Anggota komisi dalam Badan Anggaran harus mengupayakan alokasi anggaran yang diputuskan komisi dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada komisi.

Keluarga Besar
Drs. H. Mukhtarudin

Drs. H. Mukhtarudin

mukhtarudin

mukhtarudin.center

www. mukhtarudin .com

GOLONGAN KARYA